

Kajian Penyimpangan Pola Ruang Kecamatan Cimenyan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung dan Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara

Riyay Bakhti Yuliar*, Ernady Syaodih,

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

*ryyuliar@gmail.com, ernadysyaodih@gmail.com

Abstract. Cimenyan sub-district is one of the sub-districts in the North Bandung Area (KBU) that serves as a protected area for water absorption and as a buffer area (peri-urban) Bandung. Perembetan development of Bandung to cimenyan area can not be avoided as a sub-district that borders directly. Ideally, both functions of Cimenyan sub-district run according to their portion, but the development in the field shows different tendencies. Based on the problem, researchers formulated the purpose to examine the extent of land irregularities in Cimenyan Subdistrict that are compiled in digital databases spatially to be used as a reference in spatial planning. This research uses a mix method which is a combined method between quantitative and qualitative methods. Quantitative aspects in this research to find out the function of land and the amount of land use irregularities in Cimenyan District. Qualitative aspect to look at the factors that influence land use change. Data collection techniques in the form of observasi, questionnaires and interviews to respondents. The results showed that the function of land that dominates is an economic function because Cimenyan District becomes one of the vegetable producing centers for the city of Bandung. The amount of deviation of Cimenyan sub-district to the spatial plan is categorized as low, but has a huge impact. Changes in land use from protected areas, production forests, people's forests and annual crops are shifted into dryland farming, housing/settlements and trade/services. Factors that influence land use change in Cimenyan Subdistrict consist of (1) Weak government policy, (2) High need for housing and business premises, (3) Accessibility, (4) Inaccuracy of government policy, (5) Disreconsion of KBU function and prone to natural disasters. Based on the results of the study, recommendations for control of space utilization in KBU, especially Cimenyan Sub-District is the synchronization of the contents of the plan at each level of the region, especially regarding the pattern of space utilization (RTRW Bandung Regency, KBU Regional Government), tightening and monitoring building permits, increasing the participation of the community in controlling space utilization with agroforestry programs, controlling the imposition

of incentive sanctions and disisentive, namely the examination and investigation of all violations carried out in the utilization of space patterns.

Keywords: Land Use Change, Land Irregularities, North Bandung Area, Cimenyan District

Abstrak. Kecamatan Cimenyan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang berfungsi sebagai kawasan lindung resapan air dan sebagai daerah penyangga (peri-urban) Kota Bandung. Perembetan perkembangan Kota Bandung ke wilayah Cimenyan tidak bisa dihindari sebagai kecamatan yang berbatasan langsung. Idealnya kedua fungsi Kecamatan Cimenyan berjalan sesuai porsinya, namun perkembangan dilapangan menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti merumuskan tujuan untuk mengkaji sejauh mana penyimpangan lahan di Kecamatan Cimenyan yang disusun dalam database digital secara spasial untuk dijadikan acuan dalam perencanaan tata ruang. Penelitian ini menggunakan mix method yang merupakan metode gabungan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Aspek kuantitatif dalam penelitian ini untuk mengetahui fungsi lahan dan besaran penyimpangan penggunaan lahan di Kecamatan Cimenyan. Aspek kualitatif untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Teknik pengumpulan data berupa observasi, kuesioner serta wawancara kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan fungsi lahan yang mendominasi adalah fungsi ekonomi karena Kecamatan Cimenyan menjadi salah satu sentra penghasil sayuran untuk Kota Bandung. Besaran penyimpangan Kecamatan Cimenyan terhadap rencana tata ruang di kategorikan rendah, namun memberikan dampak yang sangat besar. Perubahan penggunaan lahan dari kawasan lindung, hutan produksi, hutan rakyat dan tanaman tahunan banyak beralih fungsi menjadi pertanian lahan kering, perumahan/perbukitan dan perdagangan/jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Cimenyan terdiri dari (1) Lemahnya kebijakan pemerintah, (2) Tingginya kebutuhan tempat tinggal dan tempat usaha, (3) Aksesibilitas, (4) Ketidak sinkronan kebijakan pemerintah, (5) Ketidaktahuan terhadap fungsi KBU dan rawan bencana alam. Berdasarkan hasil kajian tersebut, rekomendasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang di KBU khususnya Kecamatan Cimenyan adalah sinkronisasi isi rencana di setiap jenjang wilayah terutama mengenai pola pemanfaatan ruang (RTRW Kabupaten Bandung, Perda KBU), memperketat dan pemantauan izin membangun, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dengan program agroforestry, penertiban berupa penerapan sanksi insentif dan disinsentif yaitu pemeriksaan dan penyelidikan semua pelanggaran yang dilakukan terhadap pemanfaatan pola ruang.

Kata Kunci : Perubahan Penggunaan Lahan, Penyimpangan Lahan, Kawasan Bandung Utara, Kecamatan Cimenyan

1. Pendahuluan

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dalam perkembangannya memiliki kawasan penyangga yang mengakibatkan terjadinya pergeseran ke daerah perbatasan. Kawasan penyangga di bagian utara dikenal dengan KBU (Kawasan Bandung Utara) yang memiliki fungsi lindung dan konservasi. Wilayah KBU secara administrasi meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Pembangunan di Kabupaten Bandung sebelah utara tidak sepesat wilayah lainnya yang berada di KBU. Pasca krisis ekonomi para pengembang membiarkan lahan yang dimilikinya terbengkalai dan dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai lahan pertanian. Kabupaten Bandung yang masuk KBU meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Cilengkrang dan Kecamatan Cileunyi. Secara geografis Kecamatan Cimenyan lebih dekat ke pusat Kota Bandung dibandingkan Kecamatan Cileunyi dan Cilengkrang. Terhitung 9,1 km dari titik nol Kota Bandung ke pusat Kecamatan Cimenyan (Google Map, 2020). Laju *urban sprawl* lima kecamatan di Kota Bandung yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Cimenyan berada di level menengah dan tinggi. Pembangunan properti mulai terlihat di desa dan kelurahan yang berbatasan dengan Kota Bandung.

Pergeseran fungsi yang terjadi di Kecamatan Cimenyan dipengaruhi adanya faktor eksternal dan faktor internal yang terkait dengan perkembangan dan tingkat pelayanan sarana serta utilitas kota, ketersediaan lahan dan fasilitas perkotaan. Besarnya penyimpangan penggunaan lahan eksisting Kecamatan Cimenyan dengan rencana tata ruang dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Seberapa besarkah penyimpangan pola ruang di Kecamatan Cimenyan terhadap RTRW Kabupaten Bandung dan Pedoman Pengendalian KBU sebagai dampak dari perkembangan Kota Bandung ke wilayah penyangga?”. Selanjutnya, sasaran dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Mengidentifikasi fungsi dominan yang berkembang saat ini di Kecamatan Cimenyan
2. Mengidentifikasi besaran penyimpangan penggunaan lahan di Kawasan Bandung Utara khususnya di Kecamatan Cimenyan berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung dan Pedoman Pengendalian KBU
3. Mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Cimenyan

2. Landasan Teori

Menurut Deliyanto (2005), keterkaitan lahan dengan ruang adalah sebagai landasan atau bidang dasar bagi pembentukan ruang baik berupa wilayah pemerintahan maupun yang berupa kawasan baik itu kawasan lindung atau budidaya. Lahan sebagai dimensi dasar ruang mempunyai berbagai fungsi yaitu fungsi lingkungan, ekonomi, sosial.

Penggunaan lahan (*landuse*) merupakan bentuk campur tangan terhadap sumberdaya lahan, baik yang sifatnya menetap atau merupakan daur (*cyclic*), yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebendaan maupun kejiwaan (*spiritual*) atau kedua-duanya (Vink 1975 dalam Sitorus 2016). Faktor yang menjadi penentu perubahan lahan menurut Vink, 1975 dalam Basri, Syakur & Marta, 2013 terdapat dua faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan yaitu :

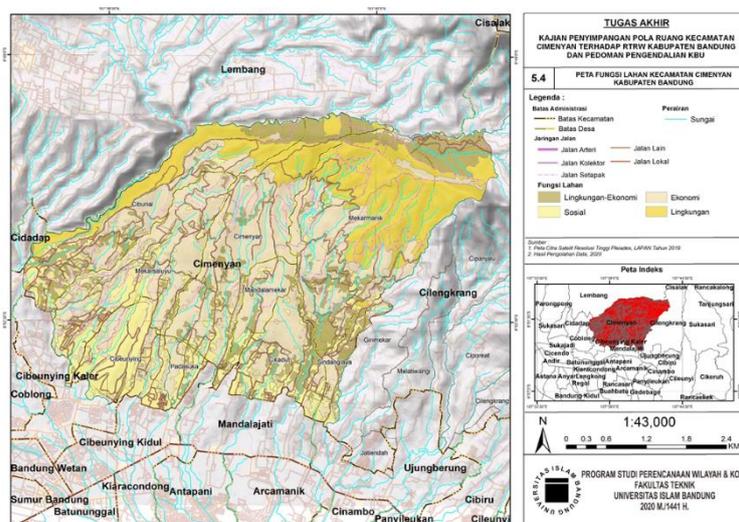
- Faktor alami diantaranya adalah iklim, relief, tanah atau adanya bencana alam seperti gempa bumi atau banjir.
- Faktor manusia mempunyai pengaruh yang dominan dibandingkan dengan faktor alami. Perubahan penggunaan lahan ditentukan oleh aktivitas manusia pada sebidang lahan yang spesifik untuk memenuhi kebutuhannya.

Penyimpangan atau inkonsistensi penggunaan lahan merupakan padanan ketidaksesuaian penggunaan lahan eksisting dengan rencana penggunaan lahan. Meningkatnya kebutuhan lahan akibat bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan terjadinya tumpang tindih kepentingan terhadap sebidang lahan. Hal ini jika dibiarkan dapat mengarah pada pola sebaran kegiatan yang secara ekonomi paling menguntungkan, namun belum tentu menguntungkan atau bahkan merugikan dari segi lingkungan (Wiradisastira, 1989 dalam Rachmawaty, 2008).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Identifikasi Fungsi Lahan Dominan di Kecamatan Cimenyang

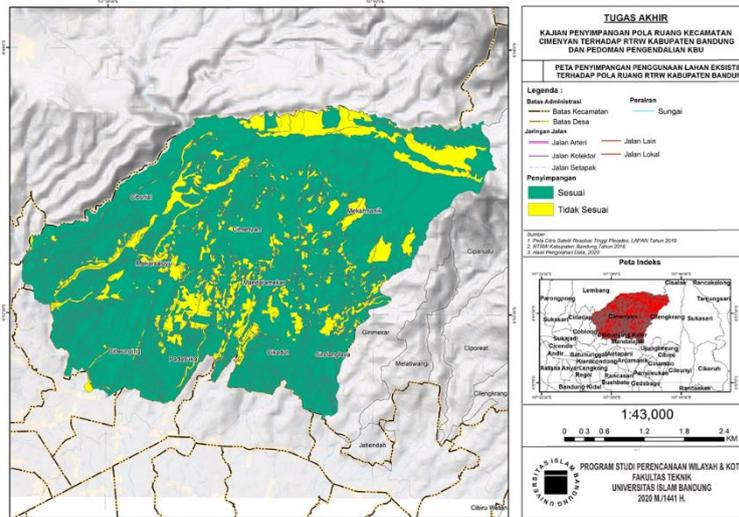
Kecamatan Cimenyang memiliki fungsi lahan yang paling dominan yaitu fungsi ekonomi dengan luas 41,42% sedangkan luas fungsi lingkungan sebesar 23,13% dari luas total. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya yaitu sebagai fungsi lindung. Fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah menyebabkan terjadinya penyimpangan pola ruang.



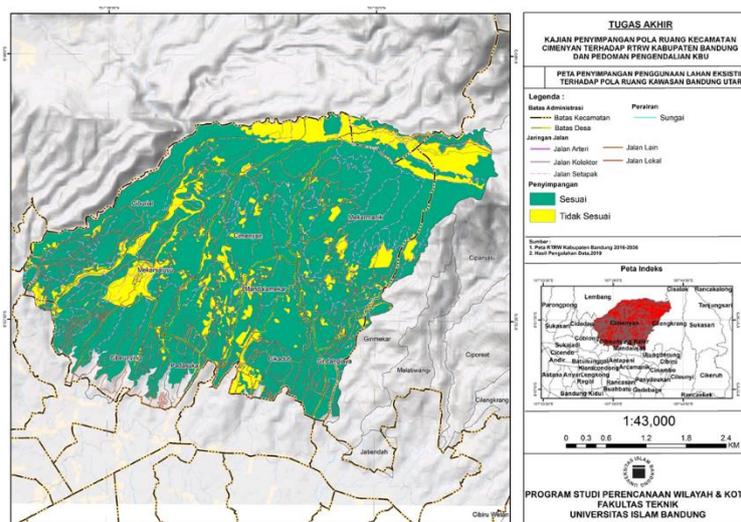
Gambar 1. Fungsi Lahan di Kecamatan Cimenyang

Penyimpangan Pola Ruang di Kecamatan Cimenyang

Besaran penyimpangan pola ruang Kecamatan Cimenyang terhadap RTRW Kabupaten Bandung sebesar 15,72% dan besaran penyimpangan pola ruang Kecamatan Cimenyang terhadap pedoman pengendalian KBU sebesar 14,37%. Berdasarkan penilaian kualitatif besaran penyimpangan Kecamatan Cimenyang yaitu simpangan rendah. Penyimpangan terjadi di hutan lindung, hutan rakyat dan tanaman tahunan yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian lahan kering dan perumahan/jasa, meskipun dikategorikan rendah namun memberikan dampak yang sangat besar terhadap keseimbangan lingkungan di Kecamatan Cimenyang dan daerah di bawahnya yaitu Kota Bandung.



Gambar 2. Penyimpangan Penggunaan Lahan Eksisting terhadap Pola Ruang RTRW Kabupaten Bandung



Gambar 3. Penyimpangan Penggunaan Lahan Eksisting terhadap Pola Ruang KBU

Penyebabkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Cimenyan

Penyimpangan pola ruang Kecamatan Cimenyan akibat dari adanya perubahan penggunaan lahan. Penyebab perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Cimenyan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : (1). Lemahnya pengawasan pemerintah, (2). Tingginya kebutuhan penduduk terhadap tempat tinggal dan tempat usaha, (3). Aksesibilitas, (4) Ketidaktahuan fungsi KBU dan Rawan Bencana, (5). Ketidak sinkronan kebijakan pemerintah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat empat fungsi lahan di Kecamatan Cimenyan yaitu, fungsi lingkungan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan-ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi lingkungan-ekonomi menjadi temuan fungsi baru dikarenakan memiliki fungsi ganda. Fungsi ekonomi mendominasi penggunaan lahan secara umum dengan luas 2.200,09 Ha atau 41,45% dari total luas kecamatan.

2. Hampir semua desa di Kecamatan Cimenyan terjadi penyimpangan pola ruang, baik berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung dan Perda KBU. Hasil perbandingan penggunaan lahan eksisting terhadap Pola Ruang RTRW Kabupaten Bandung dan pola ruang KBU yaitu :
 - a. Penggunaan lahan eksisting- RTRW Kabupaten Bandung
 Penyimpangan tertinggi berada pada pertanian lahan Basah sebesar 277,82 Ha atau 92,79% dari rencana pola ruang Kabupaten Bandung. Penyimpangan terendah pada Hankam sebesar 7,48 Ha atau 4,70%. Besar penyimpangan di Kecamatan Cimenyan yaitu 834,21 Ha atau 16,87% dari total luas pola ruang Kecamatan Cimenyan maka penilaian kualitatif berdasarkan monitoring dan evaluasi pola ruang penyimpangan di Kecamatan Cimenyan dikategorikan simpangan rendah.
 - b. Penggunaan lahan eksisting – Perda KBU
 Penyimpangan tertinggi berada pada penggunaan peruntukan lainnya sebesar 0,50 Ha atau 88,56% dari luas rencana pola ruang KBU, sedangkan penyimpangan yang terendah adalah kawasan permukiman non perkotaan sebesar 0,17 Ha atau 0,01% dari luas rencana pola ruang KBU. kawasan permukiman non perkotaan sebesar 0,17 Ha atau 0,01% dari luas rencana pola ruang KBU. Besar penyimpangan Kecamatan Cimenyan terhadap perda KBU yaitu 737,78 Ha atau 13,90% dari total luas pola ruang Kecamatan Cimenyan maka penilaian kualitatif berdasarkan monitoring dan evaluasi pola ruang penyimpangan di Kecamatan Cimenyan dikategorikan simpangan rendah.
 - c. Penyimpangan Kecamatan Cimenyan
 Penyimpangan di Kecamatan Cimenyan berdasarkan pola ruang RTRW Kabupaten Bandung dan Perda KBU dikategorikan simpangan rendah, namun memberikan dampak yang sangat besar terhadap keseimbangan lingkungan di Kecamatan Cimenyan dan daerah di bawahnya yaitu Kota Bandung. Penyimpangan terjadi di hutan lindung, hutan rakyat, tanaman tahunan dan pertanian lahan basah yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian lahan kering dan perumahan/jasa. Besaran proporsi kawasan lindung berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung sebesar 27,91% dan kawasan budidaya sebesar 72,08%. Besaran proporsi kawasan lindung berdasarkan Perda KBU sebesar 31,30% dan kawasan budidaya sebesar 68,70%. Proporsi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang tidak seimbang sangat mempengaruhi keseimbangan lingkungan di Kecamatan Cimenyan. Kawasan lindung seharusnya lebih besar daripada kawasan budidaya karena Kecamatan Cimenyan berada di KBU yang memiliki fungsi lindung konservasi.
 - d. Penyimpangan Desa/Kelurahan di Kecamatan Cimenyan
 Desa/Kelurahan yang memiliki luasan penyimpangan tertinggi yaitu Desa Ciburial, Desa Cimenyan, Desa Mekarmanik dan Desa Mekarsaluyu. Penggunaan lahan didominasi oleh pertanian lahan kering karena Kecamatan Cimenyan merupakan kawasan penyangga Kota Bandung salah satu fungsinya yaitu mendukung kebutuhan pangan penduduk Kota Bandung. Kebutuhan terhadap rumah tinggal yang semakin tinggi dan memiliki pemandangan yang indah menarik penduduk bertempat tinggal dan mendirikan tempat usaha terutama di Desa Ciburial dan Mekarsaluyu yang letaknya berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Dibuktikan dengan adanya konversi lahan menjadi lahan perumahan/permukiman dan perdagangan/jasa.
 - e. Singkronisasi Pola Ruang RTRW Kabupaten Bandung dan Perda KBU
 Keselarasan antara dua kebijakan RTRW Kabupaten Bandung dan Pedoman Pengendalian KBU terdapat ketidakselarasan sebesar 8,96 %
3. Perubahan penggunaan lahan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan, sedangkan jika dilihat dari segi ekonomi memiliki nilai keuntungan bagi para petani dan investor. Penyebab perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Cimenyan yaitu (1). Lemahnya pengawasan pemerintah, (2). Tingginya kebutuhan penduduk terhadap tempat tinggal dan tempat usaha, (3). Aksesibilitas, (4) Ketidaktahuan fungsi KBU dan Rawan Bencana, (5). Ketidak sinkronan kebijakan pemerintah.

5. Rekomendasi

Penelitian tentang Kajian Penyimpangan Pola Ruang Kecamatan Cimenyan terhadap RTRW Kabupaten Bandung dan Pedoman Pengendalian KBU dalam rangka memberikan masukan untuk mewujudkan kesesuaian pola ruang aktual terhadap rencana tata ruang yang berlaku dengan mempertahankan fungsi Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan lindung dan konservasi. Rekomendasi hasil penelitian ini berupa:

1. Sinkronisasi isi rencana di setiap jenjang wilayah terutama mengenai pola pemanfaatan ruang (RTRW Kabupaten Bandung, Perda KBU) dimana penyusunan rencana tata ruang wilayah harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah di tingkat atasnya.
2. Membuat kebijakan pengendalian pemanfaat pola ruang untuk melindungi kawasan konservasi, kebijakan terkait pengendalian lahan pada kawasan terbangun dapat dilakukan :
 - a. Memperketat peraturan izin mendirikan bangunan, Pemantauan pemanfaatan ruang melalui pengawasan serta pengendalian luas bangunan (penetapan KDB, KLB, dan KDH) sesuai dengan arahan dalam Pergub
 - b. Pengendalian fungsi hidrologi lahan dengan cara penerapan rekayasa teknologi seperti resapan, lubang biopori, dan implementasi pengembangan sistem drainase lingkungan, Zero Runoff System suatu upaya konservasi di kawasan terbangun dengan mengendalikan limpasan air hujan dalam suatu persil atau kawasan supaya tidak ada air hujan yang melimpas keluar
3. Merelokasi permukiman yang berada di kawasan lindung dan di kawasan rawan bencana oleh pemerintah kabupaten menghindari korban jiwa ketika terjadi bencana.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang melalui sosialisasi mengenai kondisi KBU khususnya Kecamatan Cimenyan dan cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan menjaga fungsi konservasi KBU.
5. Memberikan pengetahuan bertani dengan metode agroforestry kepada para petani agar menghindari bentuk pertanian monokultur yang menyebabkan semakin parah kerusakan lingkungan KBU khususnya di Kecamatan Cimenyan.
6. Penertiban pemanfaatan ruang, berupa pengenaan sanksi insentif dan disinsentif yaitu pemeriksaan dan penyelidikan semua pelanggaran yang dilakukan terhadap pola pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Daftar Pustaka

- Basri, H., Syakur, & Marta, A. 2013. *Penyimpangan Penggunaan Lahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat*. Rona Teknik Pertanian, Volume 6.
- Deliyanto, B. 2005. *Manajemen Lahan. Tangerang Selatan*: Universitas Terbuka.
- Eko, T., & Rahayu, S. 2012. *Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati*. Biro Penerbit Planologi Undip, Volume 8.
- FAO. 1976. *A Framework for Land Evaluation*. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Hardjowigeno, S. 1992. *Ilmu Tanah (Cetakan ketiga)*. Jakarta: PT Melton Putra.
- Jayadinata, J. T. 1999. *Tata Guna Lahan Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Kamus Tata Ruang. 1997. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karta Departemen Pekerjaan Umum.
- Khaerani, R.. 2017. *Analisis Penggunaan Lahan dan Arahan Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Lahamendu, V., & Kustiawan, I. 2013. *Evaluasi Pemanfaatan Lahan Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah di Pulau Bunaken, Manado*. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota B

SAPPK V2N3.

- Modul Praktikum Pengelolaan Citra Digital. 2017. Bandung: Laboratorium Perpetaan Teknik Planologi UNISBA.
- Nuradilah, R. 2018. *Identifikasi Model Spasial Wilayah Peri-urban akibat Eksternalitas Kota Bandung (Studi Kasus Kecamatan Rancaekek)*. Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016. *Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategi Provinsi Jawa Barat*.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmawaty, S. 2008. *Analisis Konsistensi Pola Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang (Studi Kasus Kota Palu)*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Restina, N. 2009. *Evaluasi Penggunaan Lahan Eksisting dan Arahan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036. *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016*.
- Sitorus, S. R. P. 2016. *Perencanaan Penggunaan Lahan (Cetakan Pertama)*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Kehutanan No.41 tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
- Undang-Undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007. , Pub. L. No. UU RI No. 26 Tahun 2007.
- Violeta, R. 2013. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara*. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Yunus, H. S. 2008. *Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.